

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam menjalani kehidupan pasti akan merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Manusia akan merasa bahagia bila harapan dan keinginannya tercapai dan akan merasa sedih jika harapan dan keinginannya tidak tercapai. Kebahagiaan erat hubungannya dengan *psychological well-being* seseorang. *Psychological well-being* adalah salah satu hal yang penting di dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki *psychological well-being* yang baik akan merasa nyaman, damai, dan bahagia serta dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia secara positif.

Psychological well-being adalah konsep yang berkaitan dengan kriteria kesehatan mental yang positif. Kebahagiaan dan kepuasan hidup dirasakan lebih besar ketika individu mengalami pengalaman membina hubungan dengan orang lain dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu, dapat menerima dirinya sendiri, dan memiliki makna dan tujuan dari hidup yang mereka jalani (Ryff dan Singer dalam Steger, Kashdan & Oishi, 2007). Termasuk dalam hal ini adalah pengalaman seorang wanita dalam membina hubungan dengan orang lain dalam ikatan pernikahan atau perkawinan. Menurut Kartono (1992), wanita pada hakikatnya adalah bersifat *hetero-sentris* dan lebih sosial. Sehingga diharapkan dengan membina hubungan pernikahan, seorang wanita dapat menjadi sejahtera kehidupan lahir maupun bathinnya.

Muhyidin dalam Yuliantini (2008) mengemukakan bahwa lembaga pernikahan merupakan sebuah lembaga yang terbentuk guna terpenuhinya beberapa tujuan, salah satunya adalah tercapainya ketenangan ruh dan diri (ketenangan jiwa manusia) yakni mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia.

Pernikahan merupakan peristiwa yang penting dalam hidup seseorang. Setiap orang mendambakan kehidupan pernikahannya bahagia dan sejahtera sebagaimana hakikat pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bersatunya antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Keinginan untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, dibutuhkan perjuangan yang besar yang dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Hal ini dikarenakan dalam pernikahan terjadi transisi hidup yang signifikan bagi seseorang, yang mengharuskan seseorang menjalankan peran baru sebagai suami atau istri serta penyesuaian hidup sebagai seorang pasangan (Hurlock, 1999).

Demikian halnya pengalaman dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wanita yang memutuskan untuk menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami. Istri kedua dalam penelitian ini adalah wanita yang menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki seorang istri. Penyesuaian ini dirasa akan semakin sulit karena bentuk pernikahan yang dijalankan adalah poligami yang tidak umum dan kadang masih memiliki citra negatif dimasyarakat serta dibutuhkan ketahanan mental untuk dapat berbagi suami dengan istri yang lain.

Poligami merupakan salah satu dari bentuk pernikahan yang ada di dunia. Secombe & Warner (dalam Haryadi, 2009) menemukan beragam bentuk-bentuk pernikahan yang dipraktekkan masyarakat di dunia. Bentuk-bentuk pernikahan itu antara lain *monogamy* yang berarti pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan; *poligamy* yang terdiri dari: *Poliginy*, yaitu pernikahan antara seorang pria dengan beberapa wanita dan *polyandry*, yaitu pernikahan antara seorang wanita dengan beberapa pria; serta poliginandri (atau disebut juga *group marriage*), yaitu pernikahan dalam bentuk para suami dan para istri berbagi pasangan. Di masyarakat Indonesia sendiri, poligini cenderung diartikan sama dengan poligami, yaitu suami yang memiliki banyak istri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah poligami untuk menggambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dalam satu waktu.

Berdasarkan penelitian Murdock (dalam Bergstrom, 2004) diketahui bahwa pernikahan poligini diperbolehkan pada mayoritas masyarakat di dataran Afrika, Mediterania, Eurasia, Pasifik, dan Amerika Utara dan Selatan. Dari 862 (83 %) kelompok masyarakat hanya sekitar 10% laki-laki yang benar-benar mempraktekkan pernikahan poligami. Sehingga poligami merupakan bentuk pernikahan yang masih jarang terjadi daripada bentuk pernikahan monogami. Sedangkan menurut Broude (dalam Slonim-Nevo & Alkrenawi, 2006) pernikahan poligami merupakan bentuk pernikahan yang biasa terjadi di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Kepulauan Pasifik, serta beberapa kelompok masyarakat barat lainnya (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006).

Pernikahan poligami memiliki beberapa dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari pernikahan poligami antara lain: (1) Poligami menekan banyaknya prositusi, (2). Poligami akan memungkinkan wanita mendapatkan haknya akan cinta dari suami dan hak menjadi ibu yang mungkin tidak akan terlaksana karena sistim monogamy,(3) poligami akan mengurangi perceraian yang tak terhitung banyaknya (4) Poligami akan memperbaiki masa depan anak-anak karena kelahirannya diakui oleh masyarakat dan Negara (<http://hanyamadu3.blogspot.com/2009/04/dampak-positif-dan-negatif-poligami.html>)

Contoh keberhasilan pernikahan poligami adalah kisah kesuksesan pengusaha dan juga pimpinan Pondok Pesantren Riyadhul Jannah di Mojokerto, Kyai Mahfud. Beliau memiliki empat orang istri dan 20 orang anak dalam satu rumah. Uniknya istri-istri barunya tersebut dinikahi sang Kyai berdasarkan hasil rekomendasi dari istri-istri sebelumnya. Menurut beliau, resep kearmonisan rumah tangganya adalah menjaga komitmen bersama untuk kesadaran diri dan saling mengalah. Keberhasilan membina rumah tangga poligami tersebut juga karena terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin secara adil bagi istri-istrinya sehingga para istri menjadi bahagia (Sudirman, 2010).

Dampak negatif yang disebabkan oleh poligami secara umum dapat dibagi kedalam lima bagian yakni dampak psikologis terhadap istri, konflik internal dalam keluarga, dampak psikologis bagi anak, kekerasan domestik, serta dampak sosial. (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006).

Penelitian yang dilakukan Adams dan Mburugu (1994), Kilbride dan Kilbride (1990), dan Wittrup (1990) menunjukkan bahwa poligami dapat menyebabkan para istri mengalami kecemburuan, persaingan, dan memungkinkan adanya distribusi kebutuhan emosional dan kebutuhan rumah tangga yang tidak setara diantara para istri (Slonim-Nevo & Al Krenawi 2006). Selain itu, pada beberapa kasus poligami dengan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA, istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak apapun atas harta dan properti suami (Mulia, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Broude (1994) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat yang menganut sistem pernikahan poligami memberikan status yang terhormat pada istri pertama. Istri pertama memiliki kontrol terhadap istri-istri lain dan memiliki hak istimewa untuk tidak berbagi dengan istri lain, istri pertama lebih memiliki pengaruh terhadap suami dibandingkan istri-istri yang lain. Kemudian pada beberapa masyarakat, istri pertama memiliki hak untuk menentukan dan merancang pernikahan kedua suaminya (Al-Krenawi, Graham & Slonim-Nevo , 2006). Leli Nurohmah (2002) mengemukakan bahwa banyak temuan yang menunjukkan bahwa istri kedua dan seterusnya lebih banyak yang diabaikan dan mengalami kekerasan. Sebagian suami pada akhirnya kembali pada istri pertama, karena masyarakat biasanya lebih mengakui istri pertama sebagai istri yang sah. Selain itu reaksi sosial yang muncul pun sering bernilai negatif terhadap istri kedua.

Berikut ini adalah salah satu kutipan wawancara awal antara peneliti dengan salah satu informan penelitian:

“Selama ini aku belum punya rumah tinggal, aku selama ini diam tapi kok sampai sekarang blm dibikinkan rumah....alasannya nunggu anak sama istri yang pertama menikah, selama ini aku diem...tapi yang namanya hati tetep gak terima.. Kalau orang awam memandang udah lama kok nggak dibikinkan rumah...tapi kadang-kadang aku juga merasakan dia sayang banget...hubungan saya sama istri pertama ya...nggak ada baike...nggak ada tegur-teguran, tapi semua tahu...saya bukan istri simpanan..suamiku pernah kena *stroke*, kalau seperti itu kan aku kalah dari istri pertamanya.”

Praktik poligami masih merupakan hal yang menimbulkan pro dan kontra di Indonesia, namun pada kenyataannya dewasa ini pernikahan poligami semakin marak dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pemerintah telah mengatur syarat dan pelaksanaan pernikahan poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5. Sedangkan khusus bagi pemeluk agama Islam, yang menjadi landasan praktik pernikahan poligami adalah QS: An-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Legalisasi tersebut berakibat semakin banyaknya praktik poligami yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Tahun 2005, tercatat ada 989 permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tak semua pengajuan itu dikabulkan. Ada 803 permohonan izin poligami yang dikabulkan. Berarti 186 lainnya ditolak. Penolakan itu, menurut Dirjen Peradilan Agama (Badilag) Wahyu Widiani, disebabkan adanya

persyaratan poligami yang tak terpenuhi. Badilag juga mencatat, sepanjang tahun 2005 perceraian yang disebabkan poligami totalnya ada 879 atau 0,6 persen dari seluruh perkara perceraian di Indonesia. Menariknya, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung merupakan PTA yang paling sering menangani perceraian yang disebabkan poligami. Di kota kembang ini, tahun 2005, terdapat 324 perkara poligami. PTA Surabaya menempati urutan kedua, jumlahnya 162 atau separuh dari jumlah perkara serupa di Bandung. Menyusul di tempat ke tiga adalah PTA Semarang. Jumlahnya 104 perkara ([http:// hukum online. com/berita /baca/15941/ menguak-sisi-gelap-poligami](http://hukumonline.com/berita/baca/15941/menguak-sisi-gelap-poligami))

Media cetak maupun elektronik juga ramai memberitakan pernikahan poligami di kalangan artis yang antara lain terjadi pada pasangan Cut Keke dan Malik Bawazir, di mana Cut Keke menjadi istri kedua dari Malik Bawazir, Mayangsari yang menjadi istri kedua Bambang Trihatmojo, dan juga pelawak Kiwil yang berpoligami dengan menikah lagi dengan Meggy. Sedangkan dari kalangan agamis sendiri, Abdullah Gymnastiar atau yang lebih akrab disapa Aa Gym mengumumkan pernikahan keduanya dengan Elfarini Eridani pada Desember 2006 lalu. Yang paling akhir terjadi adalah suami Peggy Melati yang berpoligami dengan Leenda sehingga Peggy pun menggugat cerai suaminya (<http://indonesia-ku.org/19730/dinikahi-suami-peggy-melati-leenda-rela-dipoligami/>).

Demikian juga halnya dengan pengalaman berpoligami yang dilakukan Zainuddin (52) tahun warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang memiliki 8 istri. Zainuddin menyatukan kedelapan istrinya dalam satu atap.

Menariknya upaya mendapatkan istri baru dilakukan dengan bantuan para istri tua (Majalah Kartini, 2011).

Kesejahteraan dalam hidup adalah keinginan setiap orang, namun tidak semua orang dapat menjadi sejahtera. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki (Elquist dalam Lianawati, 2008). Bahkan Papalia, Wendkos-Olds, dan Duskin Feldman (2004) menemukan kesejahteraan psikologis perempuan cenderung menurun setelah menikah.

Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup tertentu dapat mempengaruhi kondisi *psychological well-being* seseorang. Sedangkan Kartono (1992) mengemukakan bahwa dalam tingkah lakunya, wanita cenderung mengedepankan perasaan-perasaan dan afeksinya yang kuat. Dalam hal ini berbagai dampak positif maupun negatif dari pernikahan poligami serta penyesuaian yang harus dilakukan oleh istri kedua adalah merupakan pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan psikologis wanita yang menjadi istri kedua.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat fenomena pernikahan poligami di Indonesia yang masih menimbulkan pro dan kontra serta kepedulian peneliti terhadap kondisi wanita yang menjadi istri kedua inilah yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian tentang kondisi kesejahteraan psikologis wanita yang menjadi istri kedua dan kemudian merumuskan masalah utama penelitian yaitu “Bagaimana gambaran *psychological well-being* wanita yang menjadi istri kedua?”

Dari rumusan masalah tersebut maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul “*Psychological Well- Being* Wanita yang Menjadi Istri Kedua dalam Pernikahan Poligami”. Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi *psychological well-being* wanita yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi para wanita, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai gambaran positif maupun negatif kondisi kesejahteraan psikologis pada istri kedua dalam pernikahan poligami.
2. Bagi para suami yang sedang mempertimbangkan membentuk keluarga poligami, maupun yang telah membentuk keluarga poligami hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perdebatan pro dan kontra yang masih terus bergulir perihal poligami dari sisi kesejahteraan psikologis istri kedua.

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan khazanah pengetahuan dan informasi khususnya dalam bidang psikologi sosial, mengenai permasalahan seputar kehidupan keluarga berpoligami di Indonesia.